

TAJUK RENCANA

Menurunkan Lonjakan Positif Covid-19

KABAR menggembirakan dan menyedihkan mewarnai SKH Kedaulatan Rakyat belakangan ini. Kabar menggembirakan terkait pengakuan Presiden RI Joko Widodo yang menilai DIY terbaik dalam penanganan Covid-19. Namun setelah itu disusul kabar menyedihkan, yaitu melonjaknya kasus positif Covid-19, bahkan pada Selasa (21/7) angkanya merupakan yang tertinggi dibanding hari-hari sebelumnya, yaitu 28 kasus.

Kalau kita kritisi, sebenarnya terjadinya lonjakan kasus bukan berarti menunjukkan tidak baiknya penanganan Covid-19. Namun justru sebaliknya, fenomena itu berhasil terbaca karena bagus penanganannya. Sebab bisa dibayangkan, kasus virus Corona ibaratnya fenomena gunung es, yang kelihatan sedikit tetapi bisa jadi sebenarnya sangat banyak. Apalagi mayoritas penderita Covid-19 di DIY tanpa gejala. Karena itu, kalau penanganannya bagus maka akan cepat diketahui kenyataan sebenarnya, tetapi kalau penanganan tidak bagus maka suatu saat akan terjadi ledakan.

Lantas, mesti bagaimana kita semua? Yang pasti, kenyataan yang ada mesti disikapi secara bijak. Kita tidak perlu khawatir berlebihan terkait dengan adanya lonjakan kasus. Bahkan berharap semoga fenomena gunung es segera sirna, dalam arti semua yang tampak sehat ini benar-benar sehat, tidak terpapar virus Corona dan secepatnya terjadi penurunan kasus atau malah tidak ada kasus sama-sekali.

Namun untuk itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu perlu upaya bersama memutuskan mata rantai penyebaran

virus Corona. Antara lain dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kita perlu evaluasi bersama, apakah protokol kesehatan sudah benar-benar kita laksanakan, baik saat berada di tempat kerja, di tempat belanja, sepulang dari tempat kerja, atau di tempat-tempat umum lainnya, misalnya di objek wisata yang sebagian sudah mulai buka kembali.

Kita semua memang mesti senantiasa menjaga kesehatan masing-masing, menjaga kesehatan anggota keluarga, bahkan menjadi kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Sebab, meski diri sendiri sehat, tetapi kalau ada anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang terkena virus Corona, maka akan mudah menyebar ke diri kita. Karena itu, dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat mestinya dimulai dari diri sendiri masing-masing. Orang lain, bahkan aparat pemerintah yang melakukan razia masker, atau menerapkan denda bagi yang tidak bermasker, misalnya, pada hakikatnya hanya membantu kita agar tetap sehat.

Kiranya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta jajarannya sudah tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk berperilaku hidup sehat. Maka tidak ada kata lain kecuali mengikutinya dan mematuhi. Kita tidak boleh terkecoh oleh keadaan yang seolah-olah sudah normal. Bisa jadi, virus Corona ada di dekat kita. Karena itu mari kita jadikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin menjadi gerakan bersama. Akhirnya, semoga virus Corona segera sirna. □-o

SEJAK berabad-abad lampau para negarawan mengangkat diktum sakral: *salus populi suprema lex exto*, artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Pernyataan mulia ini berasal dari Marcus Cicero (106-43 BC), filsuf terkemuka Italia. Antara lain, tertulis pada lambang Parlemen Swiss *salus publica suprema lex exto*, menegaskan tujuan mulia yang sama. Tujuan sakral semacam itu ditegaskan pula dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai komitmen nasional bahwa kita 'membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia', yang imperatif mengikat kita.

Disesalkan, ketika makin nyata Covid-19 menjadi ancaman serius terhadap keselamatan rakyat, pemerintahan negara kita bersikap ambivalen. Dimulai dari yang semula sempat ragu dan meremehkan pandemi, sampai kemudian bersikap tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menangani virus sangat berbahaya ini. Orientasi Pemerintah tidak mengerucut terfokus pada titik-tolak keselamatan rakyat sebagai hukum publik tertinggi.

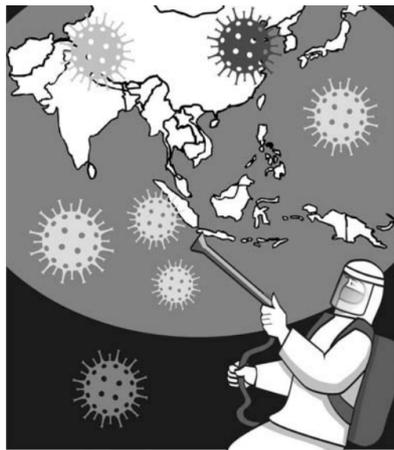
Generasi Demikian pula masyarakat luas rasarasanya kurang terikat pada komitmen nasional ini. Barangkali kurang memahami bahwa menjaga kelangsungan hidup masyarakat, disertai semangat eksistensialistik generasinya dan generasi mendatang, merupakan suatu tugas peradaban manusia, menghindari terjadinya *lost generation*. Komitmen nasional ini tereduksi menjadi suatu *remeh temeh*, mencampuradukkan antara *new normal* atau *neu abnormal*.

Menghadapi pandemi golongan terpelajar mengungkapkan kapasitas yang mereka sebut sebagai 'modal sosial-kultural'. Yaitu kapasitas-kapasitas dari masjid, gereja, pura, vihara, sekolah, pesantren, PGRI, kampus, PMI, rumah sakit, RT/RW, jajaran birokrasi untuk menanamkan kesadaran akan bahaya kelangsungan hidup bermasyarakat, terhadap warga-warga dan *clienteles*-nya masing-masing. Modal sosial-kultural ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Rendahnya disiplin masyarakat mengikuti protokol pan-

Sri Edi Swasono

demasi dan pengawalan pelaksanaan protokol pandemi dari pemerintah perlu pula ditingkatkan.

Kita adalah makhluk-sosial, dari sinilah sumber semangat 'kebersamaan'. Kita sedang mencari solusi efektif menangani pandemic. Jika 2 Maret 2020 tercatat 2 orang terpapar Covid 19, tanggal 18 Juli angka ini mencapai 84.882 dengan korban meninggal 4.016 jiwa, yang tidak menun-



KR-JOKO SANTOSO

jukan angka penurunan bahkan sebaliknya gejala melonjak (Gugus Tugas, 18/7). Hal ini berarti telah melampaui jumlah asal negeri wabah China yang hanya 83.644 (idem). Covid 19 merupakan mesin pembunuh (Doni Monardo, 18/7/2020).

'Kebersamaan' diperlukan untuk membentuk suatu fokus-kultural bahwa pandemi sebagai 'musuh-bersama' (*a common enemy*), yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas nasional untuk mengatasi pandemi. Kebersamaan ini adalah sikap 'sehati' untuk bersama-sama menaklukkan pandemi, jangan sampai tereduksi oleh *guyub*, menyukai berkumpul sebagai sifat bawaan makhluk-sosial. Inilah *new normal* itu.

Ambivalensi

Presiden marah-marah terhadap para menteri yang tidak memiliki *sense of crisis*, yang berarti Presiden sendiri gagal mewu-

judkan 'kebersamaan' dan menegakkan *leadership* dalam kabinetnya. Birokrasi masih permisif terhadap maskapai penerbangan, negara kepulauan kita ibarat menjadi kontinen. Turis asing tetap diharapkan datang, kehadiran invasif TKA ditolerir. Ambivalensi menjadi kendala untuk memilih antara kepentingan ekonomi dan penanganan pandemi.

Pandemi melumpuhkan perekonomian nasional. Sebaliknya perekonomian nasional yang sehat dibutuhkan untuk membiayai penanganan pandemi. Kita akui hal ini merupakan pilihan berat bagi Presiden untuk menilai *opportunity cost* antara pandemi dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Solusinya adalah ber-*ambeg parama arta*, menggariskan prioritas baru, menunda proyek-proyek yang kurang urgen. Termasuk menunda/membatalkan rencana kontroversial pindah Ibukota negara, menunda Pilkada Serentak 2020 dan lain-lain, yang menegasi upaya memberantas pandemi yang melelahkan dan membosankan. Kita capek ber-PSBB, berkarantina mandiri, mentresing OTG dan seterusnya.

Pemerintah merencanakan mengimpor vaksin dari China. Di era perang biologi ini, kita kerahkan ahli farmakologi dan biologi-molekuler untuk mewaspadai vaksin impor. Untuk memastikan kandungannya tidak membahayakan eksistensialisme generasi kita.

Kita harus tetap teguh pada diktum mulia *salus populi suprema lex exto*. Pandemi harus menjadi 'musuh-bersama' seperti ketika kita berhasil menang dalam perjuangan kemerdekaan nasional, dengan memposisikan penjajah Belanda sebagai 'musuh-bersama' rakyat Indonesia. □-o

\*) Prof Dr Sri Edi Swasono, Ketua Majelis Luhur Tamansiswa, Guru Besar Universitas Indonesia.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengimprimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkukurni) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Pendidik yang Terdidik

SECARA umum kita dapat mengatakan bahwa kita tidak akan mampu mendidik dengan baik, apabila kita sendiri tidak terdidik. Manusia secara fitrah membutuhkan bimbingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Manusia bukan sebatas makhluk yang dapat hidup hanya dengan mengandalkan naluri insting saja. Karena itu pendidikan mutlak dibutuhkan.

Mengingat begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, maka tidak heran apabila di era modern seperti sekarang ini menjadikan lulusan pendidikan dan keguruan sebagai syarat utama menjadi pendidik. Hal itu bukan berarti hendak memonopoli bidang pendidikan hanya milik lulusan pendidikan dan keguruan saja. Namun untuk melaksanakan tugas mendidik tentu harus mengetahui hal ihwal mengenai pendidikan, dan hal ini dapat dicapai setelah seseorang menjalani pendidikan. Kita tentu tidak menafikan bahwa ada banyak orang yang mampu mengemban tugas mendidik dengan baik meski tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal. Namun demikian, kita dapat memastikan bahwa mereka pun tentu pernah menjalani proses pendidikan (nonformal atau informal) sebelumnya.

Sekarang ini kita memasuki era yang belum pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya terkait gelombang pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Muncul diksi *new normal* atau kenormalan baru yang disusul dengan diksi adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sepintas mungkin tanpa sadar kita

menyetujui bahwa ada era normal, abnormal, kemudian *new normal*. Memasuki era ketiga ini kita dituntut untuk menerapkan beragam aturan demi menjaga kesehatan melalui apa yang disebut protokol kesehatan.

Demikian juga dengan dunia pendidikan. Proses pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka, sekarang dituntut melakukan perubahan luar biasa. Kehadiran pendidik dan peserta didik bersama di ruang kelas bergeser ke ruang virtual. Tentu terdapat nilai plus dan minus dari kedua proses pembelajaran tersebut. Seperti apa kebijakan pendidikan ke depan apakah akan kembali dengan pembelajaran tatap muka atau melanjutkan pembelajaran jarak jauh (daring), yang pasti mempertimbangkan kesehatan pendidik dan peserta didik serta menjamin kualitas pendidikan menjadi faktor penting yang harus diutamakan.

Proses pembelajaran jarak jauh memerlukan teknik dan keahlian tersendiri agar tiga ranah yang terkait kognitif, afektif, dan psikomotor tetap dapat tercapai. Baik pilihan pembelajaran dengan tatap muka atau melanjutkan pembelajaran jarak jauh dan mungkin kombinasi keduanya, pada akhirnya menegaskan bahwa kehadiran seorang pendidik tetap dibutuhkan. Menghadapi keniscayaan setiap perubahan, maka berproses mengupayakan diri menjadi pendidik yang terdidik bukan sebatas kebetulan melainkan keharusan. □-o

Dede Sulaeman Apandi, SD 1 Padokan, Kasihan, Bantul.

Seni Dagang Layar

Purwadmadi

delapan tahun lalu kini benar-benar terbukti : tumbuh subur 'perdagangan di layar' dalam pertolongan teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata, yang diprediksi Ngarsa Dalem bukan *dagang layar* oleh *sailboard* melainkan oleh *personal screen*. Jika dikembalikan pada tradisi semu *pasemon* dalam kepemimpinan Jawa, *sasmita* perlambang yang harus ditelaah dengan *lantiping budi landheping pikir*. Maka *dagang layar* sebagai *pasemon*, hari-hari ini makin terbukti menjadi realitas terbesar praktik perdagangan yang menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kebiasaan Baru

Oleh karena tekanan keadaan akibat wabah, di antaranya perilaku keharusan jaga jarak, hindar kerumunan, dan membatasi kontak fisik, maka transaksi informasi dan komoditi, dipresentasikan secara luar biasa dengan fasilitasi *screen business*, serba digital dan *on line* atau media dalam jaringan (daring). Termasuk transaksi kebutuhan hiburan melalui mata hiburan: kesenian dan seni. Ekspresi panggungan berpindah ke dalam ekspresi layaran. Termasuk, seminar via web (webinar) sebagai bentuk pelampiasan rindu bercakap-cakap, memenuhi kebutuhan ekspresi pikiran dan perasaan. Perjumpaan layar menjadi kebiasaan baru yang makin menyenangkan meski belum tentu menghangatkan. Setiap menemukan selalu terasa ada yang hi-

lang. Makin banyak orang berburu dan menyediakan komoditas seni daring, gaul-transaksional, memanfaatkan tradisi budaya terbaru, *screen business*. Seni dagang layar sekaligus dagang layar seni. Tampaknya, sebelum berlangsung lebih lanjut, lebih dalam, lebih kompleks, perlu disusun suatu rumusan terbaru yang paradigmatis agar logika, etika, dan estetika *screen business* menemukan jati diri keluhuran wujud transformasi amongtani menuju dagang layar. Seni dagang layar yang bermartabat sebagaimana teruang dalam visi Gubernur DIY tahun 2017: menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Yogya. Seperti dalam makna dagang layar, mungkin saja visi ini bukan pernyataan wantah lawaran, melainkan terkandung semu-*pasemon* seorang pemimpin. □-o

\*) Purwadmadi, pemerhati dan penulis seni-budaya.

Pojok KR

Inggris diminta kembalikan harta HB II. -- Mungkin yang 'dirampok' masih banyak lagi.

\*\*\*

DIY panen penghargaan perlindungan anak. -- Kian semangat selamatkan generasi muda.

\*\*\*

Maguwoharjo jadi KEK Pariwisata. -- Kesejahteraan masyarakat mesti meningkat.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penulis: Drs HM Idham Samawi. Komisarir Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Arsul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.